

	News Title : Izin Ekspor CPO Bakal Lewat Bursa Berjangka	
	Media Name : Okezone.com	Journalist : Advenia Elisabeth
	Publish Date : 02 March 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 3,000,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : Economy	Topic : Aturan Izin Ekspor CPO

Izin Ekspor CPO Bakal Lewat Bursa Berjangka

Advenia Elisabeth, MNC Portal - Kamis 02 Maret 2023 12:37 WIB



Izin Ekspor CPO Bakal Melalui Bursa Berjangka. (Foto: Okezone.com/Kemenkop)



A A A

JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mempersiapkan kebijakan perihal aturan ekspor Crude Palm Oil (CPO). Ke depannya proses ekspor **CPO** akan melalui bursa berjangka.

"Strategi besar kami adalah bagaimana menciptakan (aturan) ekspor CPO melalui bursa berjangka. Kira-kira nanti kebijakannya adalah setiap penerbitan izin ekspor CPO dan turunannya harus dipastikan bahwa CPO itu diperoleh dari bursa berjangka," ujar Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko, dalam diskusi publik Majalah Sawit Indonesia, Kamis (3/3/2023).

Baca Juga: Andalkan Kebun Rakyat, Produksi Sawit Ditargetkan 100 Juta Ton

Kemudian dalam membuat kebijakan ini tentu Bappebti mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, melihat bagaimana dampaknya pada kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan pemilik Hak Ekspor (HE), lalu jenis-jenis CPO apa saja yang wajib diekspor melalui bursa berjangka, kemudian bagaimana mekanisme bursa untuk memfasilitasi perdagangan atau mengalihkan hak ekspor ini bagi yang tidak memiliki hak ekspor.

"Kemudian tidak kalah penting adalah untuk menentukan berapa yang boleh di ekspor. Oleh karena itu kita juga membutuhkan neraca komoditas CPO," ucap Didid.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik Usai Pelonggaran Kebijakan China

Menurutnya, pertimbangan-pertimbangan ini krusial, agar kejadian tahun lalu tidak terulang di mana para pengusaha asyik melakukan ekspor namun melewatkan kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik.

"Kita sudah ada kebijakan DMO, apakah DMO ini akan diteruskan atau kebijakan yang sekarang ini sudah bisa meminimalisir kebutuhan kebijakan atau seperti apa ini masih terus kami kaji," kata Didid.

Kendati demikian, dia menegaskan kebijakan ini dipastikan akan diberlakukan namun untuk kapan diterapkannya, masih belum dapat memastikan.

Sebab, sampai saat ini pihaknya masih terus berdiskusi dengan berbagai pihak untuk membuat kebijakan yang paling tepat.

"Mungkin belum ideal tetapi kira-kira yang paling tepat saat ini. Ke depan akan kita perbaiki. Karena kita juga perlu melihat dari sisi insentif pelaku usahanya, baik dari pajaknya, biayanya, transaksinya," beber Didid.